

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Bagian metode penelitian ini menyajikan mengenai cara kerja penelitian yang mana dalam bagian ini akan berisikan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, alat analisis/metode yang digunakan dalam menganalisis data, teknik pengumpulan data, serta definisi atau batasan operasional.

#### **3.1. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 61). Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Kubu Raya setelah diberlakukannya kebijakan pemekaran wilayah (setelah menjadi Daerah Otonom Baru) yang akan dilihat dari kinerja ekonomi, kinerja keuangan pemerintah daerah, kinerja pelayanan publik, dan aparatur pemerintah dengan membandingkan dengan daerah induknya serta daerah kontrol (Provinsi Kalimantan Barat tanpa wilayah intervensi pemekaran) sebaik tolak ukur kedua wilayah yang mengalami pemekaran. Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks kinerja ekonomi daerah, meliputi:

1. Pertumbuhan PDRB non-migas

2. PDRB per kapita
3. PDRB per kapita
4. Rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi
5. Angka Kemiskinan

Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks kinerja keuangan pemerintah daerah, meliputi:

1. Ketergantungan fiskal
2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan
3. Proporsi Belanja Modal
4. Kontribusi sektor pemerintah

Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks pelayanan publik, meliputi:

1. Jumlah siswa per sekolah
2. Jumlah siswa per guru
3. Ketersediaan fasilitas kesehatan
4. Ketersediaan tenaga kesehatan
5. Kualitas infrastruktur

Indikator yang digunakan untuk menghitung indeks kinerja aparatur pemerintah daerah, meliputi:

1. Kualitas pendidikan aparatur
2. Persentase aparatur paramedis

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang dianalisis adalah data numerik (angka) dan cara analisisnya dengan cara matematis atau menggunakan teknik statistik (Kuncoro, 2015:145). Data yang digunakan dalam bentuk *time series* (runtut waktu) dari tahun 2008-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013: 150). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mempawah.
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah kajian dokumen. Kajian dokumen merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat data yang tersedia dalam bentuk arsip (Kuncoro, 2013:98). Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Ketua Bappeda Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan informasi selain data kuantitatif yang telah digunakan yang nantinya akan disajikan di bagian latar belakang penelitian guna memperkuat informasi yang ada pada bagian latar belakang. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yaitu semua

informasi yang diberikan informan diungkapkan dengan kata-kata informan sendiri. Wawancara juga bersifat non-formal, dimana semua susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat berubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara (Kuncoro, 2013: 96).

### **3.4 Alat Analisis**

Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Alat ini merupakan teknik, alat, atau prosedur yang dipakai untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Data yang telah dikumpulkan perlu disajikan untuk memudahkan penyaji dan pihak lain agar lebih mudah dimengerti, cukup menarik, komunikatif, dan informatif. Analisis deskriptif data juga meliputi penyajian data dalam berbagai bentuk seperti hasil pengolahan/penggunaan *software*, grafik, gambar, dan sebagainya.

Langkah pertama analisis pada penelitian ini sebelum menghitung masing-masing indeks dari indikator yang digunakan adalah menstandarisasi semua data dari setiap indikator yang digunakan. Hal ini dilakukan dikarenakan indikator-indikator pada setiap indeks yang digunakan pada penelitian ini memiliki perbedaan nilai, sehingga diperlukan proses standarisasi guna menyetarakan nilai dari setiap indikator yang digunakan pada penelitian ini. Metode perhitungan yang digunakan

untuk menstandarisasi data yang akan digunakan adalah sebagai berikut (BAPPENAS dan UNDP, 2008):

$$X_{i,j}^{\wedge} = \frac{X_{i,j} - Min_j}{Max_j - Min_j} \times 100$$

$X_{i,j}^{\wedge}$  = Nilai yang distandarisasi dari kabupaten i variabel j

$X_{i,j}$  = Nilai data asal dari kabupaten i variabel j

$Min_j$  = Nilai minimum variabel j

$Max_j$  = Nilai maximum variabel j

Langkah selanjutnya setelah data distandarisasikan adalah menggunakan hasil dari standarisasi tersebut pada perhitungan kinerja ekonomi daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, kinerja pelayanan publik, dan kinerja aparatur pemerintah. Keempat indeks yang digunakan pada penelitian ini pada dasarnya merupakan rata-rata tertimbang dari keseluruhan indikator yang digunakan. Indeks ini merupakan alat yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan *United Nations Development Programme/UNDP* (2008).

Setelah ditemukan hasil dari setiap indikator, maka selanjutnya hasil tersebut akan saling dibandingkan, yakni antara hasil dari DOB dengan daerah induknya. Namun, selain kedua wilayah yang terintervensi pemekaran akan digunakan juga hasil dari daerah kontrol. Daerah kontrol merupakan tolak-ukur sejauh mana perkembangan pemekaran telah dilakukan. Daerah kontrol yang

dimaksud adalah daerah-daerah lain yang masih satu wilayah (provinsi) dengan DOB dan daerah induk. Daerah-daerah yang dimaksud, yaitu:

- a.) Kabupaten Bengkayang
- b.) Kabupaten Kapuas Hulu
- c.) Kabupaten Kayong Utara
- d.) Kabupaten Ketapang
- e.) Kabupaten Landak
- f.) Kabupaten Melawi
- g.) Kabupaten Sambas
- h.) Kabupaten Sanggau
- i.) Kabupaten Sekadau
- j.) Kabupaten Sintang
- k.) Kota Pontianak
- l.) Kota Singkawang

Selanjutnya, untuk melihat keseluruhan hasil pemekaran maka daerah kontrol juga akan dibandingkan dengan daerah pemekaran. Daerah pemekaran adalah gabungan dari DOB dan daerah induk.

#### **3.4.1 Kinerja Ekonomi Daerah**

Analisis kinerja ekonomi daerah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat atau mengukur setelah terjadi proses pemekaran daerah pada DOB maupun daerah induk apakah terjadi perkembangan pada kondisi perekonomian atau tidak terjadi perkembangan pada kondisi perekonomian dari daerah induk dan daerah

anak dengan menyertakan daerah kontrol dalam perbandingan keduanya, serta daerah pemekaran sebagai tolak-ukur keberhasilan pemekaran.

Analisis yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi daerah ini menggunakan Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE). Perhitungan IKE ini pada dasarnya adalah rata-rata dari keempat indikator yang digunakan pada aspek ini.

Indikator yang digunakan pada aspek kinerja ekonomi daerah, meliputi:

1. Pertumbuhan PDRB non-Migas (ECGI)

Indikator ini mengukur pergerakan roda perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Indikator ini dihitung menggunakan PDRB harga konstan 2010 menurut lapangan usaha yang mana menggunakan PDRB non-migas dikarenakan pada ketiga daerah yang bersangkutan tidak memiliki hasil bumi berupa migas. Semakin besar tingkat pertumbuhan PDRB maka menunjukkan semakin baiknya kinerja ekonomi daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

2. PDRB per Kapita (WELFI)

Indikator ini merupakan pendapatan rata-rata dari masyarakat suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB per kapita secara agregat dapat digunakan untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Dalam penelitian ini, semakin tinggi PDRB per kapita maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

### 3. Rasio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (ESERI)

Indikator ini untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah provinsi dengan wilayah provinsi. Semakin besar rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi maka semakin baik pula perkembangan perekonomian dari daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

### 4. Angka Kemiskinan (POVEI)

Selama proses pembangunan ekonomi suatu daerah sudah seharusnya mengurangi tingkat kemiskinan daerah tersebut, sehingga tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator kesuksesan pembangunan ekonomi suatu daerah. Tingkat kemiskinan pada variabel ini menggunakan *head-count index*, yaitu persentase dari jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Semakin rendah angka kemiskinan maka memiliki pengaruh yang semakin baik terhadap kinerja ekonomi daerah dan sebaliknya.

Rata-rata dari keempat indikator ini yang nilai masing-masingnya telah distandarisasi terlebih dahulu yang akan digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi daerah secara umum. Rumusan dari indeks ini adalah sebagai berikut (sumber: BAPPENAS dan UNDP, 2007):

$$IKE_{i,t} = \frac{(ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ESERI_{i,t} + (100 - POVEI_{i,t}))}{4}$$

Keterangan:

$IKE_{i,t}$  = Indeks kinerja ekonomi dari kabupaten i pada tahun t

$ECGI_{i,t}$  = Pertumbuhan PDRB dari kabupaten i pada tahun t

$WELFI_{i,t}$  = Rasio PDRB kabupaten i terhadap PDRB provinsi pada tahun t

$POVEI_{i,t}$  = Angka kemiskinan

Setelaha hasil dari IKE ditemukan, kemudian akan saling dibandingkan antara IKE DOB, IKE daerah induk, dan IKE dari daerah kontrol. Apabila hasil IKE dari DOB rata-rata di atas IKE daerah kontrol per tahunnya, maka pemekaran wilayah dianggap telah berhasil dijalankan.

#### **3.4.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan untuk melihat pencapaian pemerintah daerah dalam pembangunan, selain itu untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pemerintah melaksanakan tugasnya dalam proses desentralisasi fiskal. Indikator-indikator pada kinerja keuangan pemerintah daerah ini tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah secara mikro tetapi juga secara makro sehingga diperoleh indikator-indikator yang terukur, berimbang, dan komprehensif.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah ini menggunakan Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKPD). Perhitungan IKKPD ini pada prinsipnya juga rata-rata dari keempat indikator pada aspek ini. Indikator yang digunakan pada perhitungan aspek ni, meliputi:

### 1. Ketergantungan Fiskal (FIDI)

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap daerah pusat. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase Dana Alokasi Umum (yang sudah dikurangi dengan Belanja Pegawai) dalam Total Pendapatan Anggaran daerah. Semakin rendah nilai ketergantungan fiskal maka akan semakin baik, karena mengindikasikan bahwa daerah tersebut sudah mandiri dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan.

### 2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (FGII)

Indikator ini untuk mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*) masing-masing daerah yang bersangkutan. Proporsi PAD pada indikator ini dihitung dari persentase PDRB kabupaten yang bersangkutan. Semakin besar nilai pada indikator ini maka akan semakin baik, karena dapat diartikan bahwa besar keberhasilan pemerintah dari daerah yang bersangkutan dalam penciptaan pendapatan daerah.

### 3. Proporsi Belanja Modal (FCAPEXI)

Indikator ini digunakan untuk mencerminkan arah dari pengelolaan anggaran belanja pemerintah dalam jangka panjang sehingga memberikan *multiplier* yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. Indikator ini dirumuskan dari persentase Belanja Modal dalam Total Belanja. Semakin besar nilainya maka akan semakin baik dan sebaliknya.

#### 4. Kontribusi Sektor Pemerintah (FCEI)

Indikator ini untuk mencerminkan kontribusi pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Indikator ini dirumuskan dari persentase Total Belanja Pemerintah dalam PDRB kabupaten yang bersangkutan. Semakin besar nilainya maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah dan sebaliknya

Rata-rata dari keempat indikator ini yang nilai masing-masingnya telah distandarisasi terlebih dahulu yang akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan pemerintah secara komprehensif. Rumusan dari indeks ini adalah sebagai berikut (sumber: BAPPENAS dan UNDP, 2007):

$$IKKPD_{i,t} = \frac{((100 - FIDI_{i,t}) + FGII_{i,t} + FCAPEXI_{i,t} + FCEI_{i,t})}{4}$$

Keterangan:

$IKKPD_{i,t}$  = Indek kinerja keuangan pemerintah daerah dari kabupaten  
i pada tahun t

$FIDI_{i,t}$  = Ketergantungan fiskal dari kabupaten i pada tahun t

$FGII_{i,t}$  = Kapasitas Penciptaan Pendapatan dari kabupaten i pada tahun t

$FCAPEXI_{i,t}$  = Proporsi belanja modal dari kabupaten i pada tahun t

$FCEI_{i,t}$  = Kontribusi sektor pemerintah dari kabupaten i pada tahun t

Setelah hasil dari IKKPD ditemukan, kemudian akan saling dibandingkan antara IKKPD DOB, IKKPD daerah induk, dan IKKPD dari daerah kontrol.

Apabila hasil IKKPD dari DOB rata-rata di atas IKKPD daerah kontrol per tahunnya, maka pemekaran wilayah dianggap telah berhasil dijalankan.

### **3.4.3 Kinerja Pelayanan Publik**

Analisis kinerja pelayanan publik ini difokuskan kepada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena rentang waktu yang termasuk relatif singkat (10 tahun setelah pemekaran) sehingga kemungkinan perubahan dalam indikator ini belum terlihat dan pada penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada sisi input pelayanan publik.

Analisis kinerja pelayanan publik ini menggunakan Indeks Pelayanan Publik (PPI). Perhitungan PPI ini pada prinsipnya adalah rata-rata dari ketujuh indikator pada aspek ini. Indikator yang digunakan pada aspek ini, meliputi:

1. Jumlah Siswa per Sekolah

Indikator ini mencerminkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat daerah dengan cara melihat rasio daya tampung sekolah yang ada pada daerah yang bersangkutan yang mana semakin besar daya tampung sekolah maka akan semakin baik pula. Jumlah siswa per sekolah dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP (BEFI) dan tingkat lanjutan SMA (AEFI).

2. Jumlah Siswa per Guru

Indikator ini untuk mencerminkan kualitas dari pelayanan pendidikan bagi masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Semakin rendah jumlah siswa

per guru maka akan semakin baik dan sebaliknya. Jumlah siswa per guru pada antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP (BETI) dan tingkat lanjutan SMA (AETI).

### 3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (PHFI)

Indikator ini mencerminkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Indikator ini dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan (rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling, dan balai pengobatan) terhadap 10.000 penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekakan pada skala kecamatan). Semakin besar nilainya maka akan semakin baik karena semakin besar artinya semakin banyak ketersediaan fasilitas yang ada.

### 4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan (PHOI)

Indikator ketersediaan tenaga kesehatan mencerminkan kualitas dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Indikator ini dilihat dari ketersediaan tenaga kesehatan (dokter (baik dokter umum, spesialis, maupun dokter gigi), tenaga paramedis, dan pembantu paramedis) terhadap 10.000 penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekakan pada skala kecamatan). Semakin besar nilainya maka akan semakin baik karena semakin besar artinya semakin banyak ketersediaan tenaga kesehatan yang ada bagi masyarakat pada daerah yang bersangkutan.

### 5. Kualitas Infrastruktur (PRQI)

Proses pelayanan publik yang paling utama adalah infrastruktur. Kualitas dari infrastruktur yang ada menjadi indikator keberhasilan kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Kualitas infrastruktur ini dilihat dari besarnya persentase panjang jalan dengan kualitas yang baik terhadap keseluruhan panjang ruas jalan di daerah yang bersangkutan. Semakin besar nilainya maka akan semakin baik dan sebaliknya.

Rata-rata dari indikator ini yang nilai masing-masingnya telah distandarisasi terlebih dahulu yang akan digunakan untuk melihat kinerja pelayanan publik dari pemerintah daerah secara komprehensif. Rumusan pada indikator ini adalah sebagai berikut (sumber: BAPPENAS dan UNDP, 2007):

$$PPI_{i,t} = \frac{(BEFI_{i,t} + AEFI_{i,t} + (100 - BETI_{i,t}) + (100 - AETI_{i,t}) + PHFI_{i,t} + PHOI_{i,t} + PRQI_{i,t})}{7}$$

Keterangan:

$PPI_{i,t}$  = Indek pelayanan publik dari kabupaten i pada tahun t

$BEFI_{i,t}$  = Jumlah siswa per sekolah pada tingkat pendidikan SD dan SMP dari kabupaten i pada tahun t

$BETI_{i,t}$  = Jumlah siswa per sekolah pada tingkat pendidikan SMA dari kabupaten i pada tahun t

$AEFI_{i,t}$  = Jumlah siswa per guru pada tingkat pendidikan SD dan SMP dari kabupaten i pada tahun t

$AETI_{i,t}$  = Jumlah siswa per guru pada tingkat pendidikan SMA dari kabupaten i pada tahun t

$PHFI_{i,t}$  = Ketersediaan fasilitas kesehatan

$PHOI_{i,t}$  = Ketersediaan tenaga kesehatan

$PRQI_{i,t}$  = Kualitas infrastruktur

Setelah hasil dari PPI ditemukan, kemudian akan saling dibandingkan antara PPI DOB, IKE daerah induk, dan PPI dari daerah kontrol. Apabila hasil PPI dari DOB rata-rata di atas PPI daerah kontrol per tahunnya, maka pemekaran wilayah dianggap telah berhasil dijalankan.

#### **3.4.4 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah**

Analisis kinerja aparatur pemerintah pada penelitian ini bertujuan untuk melihat ketersediaan aparatur pemerintah dalam memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan proses pemerintahan. Apabila dilihat dari sisi pembiayaan, jumlah aparatur pemerintah sangat menentukan seberapa besar menyumbang pembiayaan terhadap daerahnya dan hal ini nantinya akan berimplikasi terhadap permintaan barang dan jasa pada daerah itu sendiri. Jika dilihat dari sisi jumlah aparatur pemerintah, apabila semakin banyak jumlah aparatur yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik maka akan semakin baik pula ketersediaan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Analisis kinerja aparatur pemerintah ini menggunakan Indeks Kinerja Aparatur (IKA). Perhitungan IKA ini pada dasarnya juga adalah rata-rata dari kedua indikator pada indeks ini. Indikator yang digunakan pada indeks ini, meliputi:

1. Kualitas Pendidikan Aparatur (PPNSI)

Semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur pemerintah (PNS) maka semakin berpotensi meningkatkan kualitas kerja, sehingga semakin besar nilai pada indikator ini maka akan semakin baik. Indikator kualitas pendidikan aparatur merefleksikan tingkat pemahaman dan pengetahuan. Indikator ini dilihat dari persentase jumlah aparatur pemerintah (PNS) yang berpendidikan minimal diploma dalam total jumlah PNS pada daerah yang bersangkutan.

2. Persentase Aparatur Paramedis (HPNSI)

Indikator persentase aparatur paramedis mencerminkan seberapa besar fungsi pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peluang dijalankan yang mana semakin besar nilai dari persentase aparatur paramedisnya maka akan semakin baik pula dan sebaliknya. Indikator ini dilihat dari jumlah aparatur paramedis yang ada dalam total jumlah PNS pada daerah yang bersangkutan.

Rata-rata dari kedua indikator ini yang nilai masing-masingnya telah distandarisasi terlebih dahulu yang akan digunakan untuk melihat kinerja aparatur pemerintah daerah. Rumusan dari indeks ini adalah sebagai berikut (sumber: BAPPENAS dan UNDP, 2007):

$$IKA_{i,t} = \frac{(PPNSI_{i,t} + HPNSI_{i,t})}{2}$$

Keterangan:

$IKA_{i,t}$  = Indek kinerja aparatur

$HPNSI_{i,t}$  = Persentase aparatur paramedis

Setelah hasil dari IKA ditemukan, kemudian akan saling dibandingkan antara IKA DOB, IKA daerah induk, dan IKA dari daerah kontrol. Apabila hasil IKA dari DOB rata-rata di atas IKA daerah kontrol per tahunnya, maka pemekaran wilayah dianggap telah berhasil dijalankan.

### 3.5 Definisi dan Batasan Operasional

Definisi dan batasan operasional merupakan informasi ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Definisi operasional memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Berikut definisi dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Kinerja ekonomi daerah merupakan nilai hasil perhitungan berbagai indikator yang berkaitan dengan kinerja ekonomi untuk melihat perkembangan ekonomi dari daerah yang bersangkutan. Indikator kontrol pada penelitian ini, antara lain:

a) Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB digunakan untuk mengukur pergerakan dari perekonomian suatu daerah yang mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Pertumbuhan PDRB pada penelitian ini dihitung menggunakan PDRB harga konstan tahun 2010 menurut Lapangan Usaha pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah otonom baru, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, dan 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

b) PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, karena PDRB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan dari suatu daerah. PDRB per kapita dihitung PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah bersangkutan, dimana pada penelitian ini PDRB yang digunakan adalah PDRB per kapita harga konstan 2010 Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, dan 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

c) Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi

Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi merupakan indikator yang mencerminkan seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam suatu provinsi. Rasio

PDRB yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio PDRB Kabupaten Kubu Raya terhadap Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2008-2017 dan rasio PDRB Kabupaten Mempawah terhadap Provinsi Kalimantan Barat (tanpa daerah intervensi DOB) dari tahun 2008-2018. PDRB yang digunakan merupakan PDRB harga konstan 2010 menurut lapangan usaha.

d) Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan pada penelitian ini diukur menggunakan *head-count index*, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontro dari tahun 2008-2018.

- 2) Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan nilai hasil perhitungan berbagai indikator yang berkaitan dengan keuangan pemerintah daerah untuk melihat kemampuan pemerintah daerah mewujudkan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dari daerah yang bersangkutan. Indikator pada penelitian ini, antara lain:

a.) Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan fiskal pada penelitian ini dirumuskan sebagai persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU), namun DAU yang digunakan

sudah dikurangi Belanja Pegawai. DAU dilihat dari Total Pendapatan Anggaran Daerah pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, dan 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

b.) Kapasitas Penciptaan Pendapatan

Kapasitas penciptaan pendapatan pada penelitian ini tidak dilihat dari total nilai APBD, melainkan dilihat dari persentase dari PDRB kabupaten yang bersangkutan, yaitu Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak dan Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kapasitas penciptaan pendapatan (*income generation*) dari masing-masing daerah.

c.) Proporsi Belanja Modal

Proporsi belanja modal bertujuan untuk menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah dari program jangka panjang yang telah dilakukan, sehingga memberikan *multiplier* yang lebih besar terhadap perekonomian. Proporsi belanja modal pada penelitian ini dirumuskan dari persentase Belanja Modal dalam Total Belanja di Anggaran Daerah pada Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, serta 12 daerah lainnya

yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

d.) Kontribusi Sektor Pemerintah

Kontribusi sektor pemerintah untuk menunjukkan kontribusi dari pemerintah daerah dalam menjalankan roda perekonomian daerah. Kontribusi sektor pemerintah pada penelitian ini dilihat dari Total Belanja Pemerintah dalam total PDRB Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak dan Total Belanja dalam total PDRB Kabupaten Mempawah, serta Total Belanja dalam total PDRB 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

- 3) Kinerja pelayanan publik merupakan nilai hasil perhitungan berbagai indikator yang berkaitan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna melihat kinerja pelayanan pemerintah pada masyarakat. Indikator pada penelitian ini, antara lain:

a.) Jumlah Siswa per Sekolah

Jumlah siswa per sekolah mengindikasikan kemampuan daya tampung sekolah yang tersedia dalam suatu daerah. Jumlah siswa per sekolah pada penelitian ini akan dibedakan antara tingkat dasar (SD) dan SMP dan tingkat lanjutan (SMA/ sederajat) yang mana pada penelitian ini jumlah siswa per sekolah yang dilihat berasal dari jumlah siswa per sekolah yang ada pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten

Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

b.) Jumlah Siswa per Guru

Jumlah siswa per guru untuk menunjukkan kemampuan penyediaan tenaga pendidik dalam suatu daerah. Jumlah siswa per guru pada penelitian ini juga akan dibedakan antara tingkat dasar (SD) dan SMP dan tingkat lanjutan (SMA/ sederajat) yang mana pada penelitian ini dilihat pada Kabupaten Kubu Raya, selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

c.) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan balai pengobatan lainnya. Ketersediaan fasilitas pada penelitian ini dilihat dari rasio terhadap 10.000 penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekati pada skala kecamatan) dan ruang lingkup ketersediaan fasilitas kesehatan pada penelitian ini adalah Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

d.) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, enaga paramedis, dan pembantu medis lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan pada penelitian ini juga dilihat dalam rasio terhadap 10.000 penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekati pada skala kecamatan) dan ruang lingkup ketersediaan fasilitas kesehatan pada penelitian ini adalah Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

e.) Kualitas Infrastruktur

Indikator kualitas infrasttuktur digunakan untuk melihat proses pembangunan daerah yang telah dilakukan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik. Kualitas infrastruktur pada penelitian ini dilihat dengan besarnya persentase panjang jalan dengan kualitas yang dikategorikan baik terhadap keseluruhan panjang ruas jalan pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

- 4) Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan nilai hasil perhitungan berbagai indikator untuk melihat seberapa jauh ketersediaan aparatur dapat memenuhi

tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Indikator pada penelitian ini, antara lain:

a.) Kualitas Pendidikan Aparatur

Kualitas pendidikan aparatur pemerintah dilihat dari seberapa tinggi tingkat pendidikan dari aparat pemerintah tersebut. Tingkat pendidikan ini menunjukkan pemahaman dan pengetahuan dari aparatur pemerintah itu sendiri yang mana semakin tinggi tingkat pendidikan semakin berpotensi meningkatkan kualitas kerja. Kualitas pendidikan aparatur pada penelitian ini dilihat dari persentase jumlah aparatur yang berpendidikan minimal diploma dalam total jumlah aparatur (PNS) pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta 12 daerah lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018.

b.) Persentase Aparatur Paramedis

Persentase aparatur paramedis mencerminkan seberapa besar fungsi (kesehatan) masyarakat yang memiliki peluang dijalankan. Persentase aparatur paramedis pada penelitian ini dilihat dari jumlah aparatur tenaga kesehatan dalam total jumlah aparatur (PNS) pada Kabupaten Kubu Raya selaku daerah anak, Kabupaten Mempawah selaku daerah induk, serta Provinsi Kalimantan Barat (tanpa daerah intervensi DOB) selaku daerah kontrol dari tahun 2008-2018. Aparatur paramedis yang dimaksud pada penelitian ini adalah dokter, bidan, maupun perawat yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu, serta polindes.